

STRATEGI DINAS DPMPSTP KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA MELALUI PROGRAM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Gracesilla Esther¹, Dewi Noor Azijah²

Gracesilla Esther, Gracesillaes@gmail.com, 081282117680, Universitas Singaperbangsa Karawang¹
Dewi Noor Azijah, dewinoorazijah@fisipunsika.ac.id, 085721465174, Universitas Singaperbangsa Karawang²

Abstract (English Version)

Online Single Submission (OSS) is a Business Licensing that is realized through the OSS Agency for and on behalf of the ministers, heads of institutions, governors, or regents/mayors for Business Actors through a structured electronic system and regulated in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Services Electronically Integrated Business Licensing. OS system related to the acceleration and investment and business as well as facilitating business actors, both individuals and non-individuals. To facilitate scheduling/management of business licensing activities such as Building Construction Permits, Environmental Permits and so on. The purpose of this study was to determine the background of the publication of OSS and its implementation in Purwakarta Regency. The research that the researcher did was qualitative. The theory used is the theory of strategy according to Wheelen and Hunger and the theory of implementation according to Warwick. It can be said that the goal of this OSS Program has not been achieved, because the first thing is to have the opportunity to have their own OS operator and the public who still do not understand about this OSS program.


Keywords: Business Licensing; Online Single Submission (OSS); Management

Abstrak (Indonesia Version)

Online Single Submission (OSS) ialah Perizinan Berusaha yang diwujudkan melalui Badan OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota bagi para Pelaku Usaha lewat sistem elektronik yang terstruktur dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Sistem OSS difokuskan bagi percepatan dan kenaikan penanaman modal dan berusaha serta memudahkan Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk memudahkan penjadwalan/pengelolaan perizinan kegiatan usaha seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang diterbitkannya OSS serta penyelenggaraannya di Kabupaten Purwakarta. Penelitian yang peneliti lakukan adalah Kualitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Strategi Menurut Wheelen dan Hunger serta Teori Implementasi Menurut Warwick. Dapat disimpulkan bahwa tujuan Program OSS ini masih belum tercapai, karena yang menjadi tujuan awal yaitu, menyederhanakan birokrasi masih memiliki kendala terkait operator OSS sendiri dan masyarakat yang masih belum mendapat pemahaman tentang program OSS ini.

Kata kunci: Perizinan Usaha; Online Single Submission (OSS); Penyelenggaraan

DOI : -

Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah melakukan pembaruan di bidang investasi dengan melakukan penyederhanaan bagi perizinan usaha dengan memberikan inovasi baru melalui metode Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Jika selama ini para pelaku usaha harus mengurus perizinan dengan cara manual dengan cara mendatangi satu per satu tempat mulai dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat kabupaten/kota, PTSP provinsi, hingga ke PTSP pusat (Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM), saat ini perizinan usaha dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem tunggal yang bernama OSS. Pemilik modal selama ini banyak yang mengeluhkan perizinan yang rumit meski telah ada pemangkasan regulasi oleh pemerintahan pusat. Maka dari itu adanya OSS diharapkan dapat meringkas tahapan dan waktu dalam memproses perizinan. Kebijakan ini berinduk kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018, dimana keputusan ini didasari dari bukti di lapangan, dimana performa pengurusan perizinan untuk dunia usaha masih jauh dari harapan. Keadaan ini dapat dilihat dari beraneka ragamnya bentuk aduan atau keluhan dari para pelaku usaha, baik melalui media pengaduan dalam bentuk website, media cetak maupun media sosial. Misalnya menyangkut tata cara dan prosedur kerja pelayanan yang bertele-tele, membutuhkan waktu lama, tidak transparan, kurang komunikatif, kurang fasilitas, kurang konsisten, sarana dan prasarana pelayanan yang terbatas. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian dari hukum, waktu dan biaya serta menekan praktik retribusi liar serta beragam praktik yang mempunyai indikasi kecurangan dan KKN. Kelebihan dari OSS ini yakni pemerintah telah merumuskan insentif fiskal baik tax holiday, tax allowance, super deduction tax, termasuk pajak penghasil (PPh) UMKM 0,5 persen. Pemilik modal yang dapat mengakses OSS tidak hanya perusahaan yang berbentuk PT, tetapi firma, persekutuan komanditer (CV), UMKM, Koperasi, maupun usaha perorangan. Sistem OSS dibentuk semenjak Oktober 2017 sebagai perwujudan dari Peraturan Pemerintahan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam hal ini untuk menghasilkan data yang akurat. Peneliti menuliskan dan mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan dari data-data yang mampu memberikan gambaran secara keseluruhan terkait mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Data dan informasi dikumpulkan dari: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dan pelaku usaha. Dari data dan informasi yang terkumpul tersebut, peneliti memperoleh gambaran

tekstual dan deskripsi struktural tentang permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian menganalisa lalu memberikan penggambaran secara deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori strategi manajemen menurut Wheelen dan Hunger dengan menganalisisnya menggunakan teori-teori terkait agar analisis lebih mendalam dan terperinci.

3. HASIL

3.1 Pengertian Teori Strategi Menurut Wheelen dan Hunger

Menurut Thomas L Wheelen dan J. David Hunger (2008:3), manajemen strategis ialah serangkaian ketentuan manajerial dan langkah untuk menetapkan performa jangka panjang dari perusahaan. Terdiri dari pemindaian lingkungan eksternal dan internal, perumusan strategi atau persiapan jangka panjang dan perwujudan dan evaluasi pengendalian strategi.

3.2 Pengertian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ialah dinas yang punya tugas utamamembantu Bupati mewujudkan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

3.3 Pengertian Program OSS

Online Single Submission (OSS) ialah Perizinan Berusaha yang diwujudkan melalui Badan OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota bagi para Pelaku Usaha lewat sistem elektronik yang terstruktur. OSS dimanfaatkan untuk pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan ciri sebagai berikut: Berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

4. PEMBAHASAN

4.1 Teori Strategi

1. Pemindaian Lingkungan

Pemindaian lingkungan yaitu mengawasi, mengevaluasi, dan memburu informasi dari lingkungan eksternal maupun internal bagi individu-individu penting di perusahaan atau dalam penelitian ini pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek strategi eksternal dan internal yang akan menentukan masa depan pemerintahan.

2. Analisis Lingkungan Internal

Suatu ulasan yang menyeluruh dari lingkungan internal terhadap kekuatan dan kelemahan yang dikuasai oleh suatu organisasi dalam bentuk menjalankan tugas, pokok dan fungsinya. Salah satu instrumen yang paling sering dipakai dalam analisa situasi adalah analisis dari Strengths (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) internal dari suatu instansi.

a) Kekuatan (Strengths)

Kekuatan atau keunggulan adanya perubahan sistem perizinan usaha dengan sistem online dengan menggunakan web OSS yaitu pandangan dari masyarakat, kemudahan melakukan perizinan bisa dirumah tidak harus ke dinasnya, hanya dengan persyaratan ktp, npw, email. Pandangan dari dinas kemudahan juga menyimpan file, memudahkan akses pengecekan persyaratan yang dilakukan oleh masyarakat. Dari segi ruangan pelayanan yang sangat nyaman, bersih serta sarana dan prasarana yang cukup memadai. Apabila masyarakat yang dipanggil ke dinas untuk melengkapi persyaratan yang tidak cukup hanya lewat web, biasanya dipanggil untuk wawancara lebih lanjut seputar usaha yang akan didirikan.

b) Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan sistem ini yaitu sistem perizinan usaha dari offline atau secara manual yang sekarang ada perubahan dengan sistem online, yang menggunakan web OSS ini kelemahan dari web OSS ini setelah kami melakukan observasi yang dirasakan oleh para pegawai salah satu usernya yaitu apabila ketika di daerah tersebut mati lampu, tidak dapat melakukan akses kegiatan dengan web OSS dikarenakan DPMPTSP di kabupaten Purwakarta belum mempunyai genset. Lalu, sistem manajemen organisasi yang belum mapan ditandakan belum adanya grand design/master plan IT. Pelayanan Sistem Perizinan sudah berbasis web namun masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkannya secara maksimal. Karena bagi masyarakat tampilan web tersebut masih sulit dipahami. Sumber Daya Manusia sebagai user itu dari web OSS, masih kurang SDMnya karena salah satu user yang kami wawancarai beliau belajar autodidak untuk memahami cara kerja web OSS itu sendiri.

3. Analisis Lingkungan Eksternal

Suatu ulasan bagi perubahan lingkungan yang dapat berpengaruh atas timbulnya suatu peluang baru maupun menjadi bahaya bagi organisasi dalam melaksanakan Tugas Pokok

dan Fungsinya. Analisa kondisi eksternal terdiri dari dua hal yaitu peluang (opportunity) dan ancaman (threat).

- a) Peluang (Opportunity), adanya kebijakan nasional untuk mendukung penyelenggaraan penanaman modal yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kebijakan nasional ini yang dimana presiden Jokowi telah menandatangani PP Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritasi Secara Elektronik pada 21 Juni 2018.
- b) Ancaman (Threat) yaitu belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan SKPD terkait. Kemampuan pemohon dan stakeholder dalam menggunakan internet

4. Strategi Formulasi

Strategi formulasi ialah peningkatan agenda jangka panjang untuk manajemen dapat efisien dari kesempatan dan bahaya lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sesudah memahami apa yang menjadi bahaya yang akan dihadapi perusahaan, harapan yang dimiliki, serta kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan, maka selanjutnya kita dapat menetapkan garis besar strategi perusahaan. Perumusan strategi meliputi :menentukan misi dinas, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan.

1. Misi dinas

Adapun Misi yang ingin dicapai sebagaimana tercantum dalam Renstra BPMPTSP / DPMPTSP 2013 – 2018 adalah :

- a. Mengembangkan penanaman modal dengan promosi dan kerjasama dengan instansi terkait serta stakeholders.
- b. Meningkatkan pemeriksaan dan pengelolaan pelaksanaan penanaman modal.
- c. Mewujudkan pelayanan yang maksimum dan segenap hati bagi rakyat dan dunia usaha.

Dari ketiga misi perusahaan, analisis dari kelompok kami sudah dijalankan dengan baik pada penerapan pada OSS, yang dimana dalam DPMPTS ada tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha yang telah membuat NIB yang dipantau setiap tiga bulan sekali apakah masih terus berjalan atau tidak tetapi yang lebih dilakukan pengawasan yaitu usaha yang besar, kalau hanya warung kecil tidak terlalu sering melakukan pengawasan. Menciptakan pelayanan yang maksimum dan segenap hati bagi rakyat dan dunia usaha, dalam misi ini pun sudah dijalankan seperti adanya perubahan

melakukan administratif atau pembuatan NIB yang dari manual hingga sekarang dilakukan online, ada masyarakat yang belum paham mengenai cara menggunakannya. Pada para staff yang siap membantu masyarakat apabila tidak bisa menggunakan OSS tersebut.

2. Tujuan

Tujuan OSS ini sendiri adalah memudahkan pelaku usaha mengurus perizinan agar dapat meningkatkan investasi secara signifikan dan perluasan kegiatan usaha masyarakat yang mana hal tersebut merupakan target kualitatif. Selain itu, pemerintah akan lebih membenahi trust (kepercayaan) kepada pelaku investasi.

3. Kebijakan

Kebijakan menyajikan arahan yang luas untuk pengumpulan ketetapan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan arahan yang luas untuk memperhadapkan perumusan strategi dan implementasi. Kebijakan-kebijakan tersebut diinterpretasi dan diimplementasi melalui strategi dan tujuan divisi masing-masing. Lalu divisi-divisi akan mengembangkan berbagai kebijakannya sendiri. Kebijakan pada penerapan Web OSS ini sendiri yaitu di landasi Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018. Pemerintah berkewajiban untuk fokus pada penanganan program pembaruan yang lebih mendasar mencakup aspek peraturan, teknik bisnis, dan bentuk layanan, kemudian pelaku usaha lebih merasakan faedahnya. Untuk mengoptimalkan investasi, perizinan harus mudah. Pada zaman digital seperti sekarang ini, perizinan usaha dapat dikerjakan secara elektronik dari yang sebelumnya secara. Perizinan berusaha berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP No. 24/2018 adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Sedangkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Strategi Implementasi Berdasarkan Teori Implementasi Menurut Warwick Implementasi sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang kemudian disusun secara cermat dan rinci. Maka dalam hal ini Implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan dari Dinas PTSP terkait

usahanya untuk menerapkan program OSS (Online Single Submission). Analisis implementasi program OSS menurut indikator Warwick, antara lain :

1. Kemampuan Organisasi

Kemampuan Organisasi merupakan kemampuan untuk melakukan kewajiban yang ditetapkan atau diutamakan menurut salah satu unit organisasi. Kemampuan Organisasi yang baik dapat dilihat dari minimnya tumpang tindih tugas setiap birokrat dan komitmennya untuk terus menjalankan program dan memperbaikinya dari dalam (internal). Dengan Kemampuan Organisasi yang baik diharapkan para birokrat dapat bekerja sama dalam sebuah unit organisasi dan mewujudkan tujuan organisasinya sendiri. Kemampuan organisasi di dalam Dinas PTSP dengan cara membantu masyarakat yang masih kesulitan dalam mengisi data dan menggunakan program OSS ini, petugas akan membantu mengarahkan apa-apa saja yang diperlukan seperti pembuatan email sebab masih banyak masyarakat yang gagap teknologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa indikator ini masih belum tercapai karena masih memiliki beberapa kekurangan.

2. Informasi

Informasi adalah segala sesuatu yang di sampaikan atau disebar oleh Dinas terkait program yang sedang dilaksanakan dalam hal ini pemberian informasi dapat berupa sosialisasi, pemasangan banner maupun penyebaran program melalui sosial media. Penyebaran Informasi yang jelas dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan detail terkait program tersebut. Penginformasian program OSS dilakukan dengan cara pemasangan banner di kantor dinas PTSP, namun tidak ada sosialisasi langsung ke masyarakat sebab ini merupakan program pusat sehingga dinas PTSP merasa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sosialisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa indikator ini telah dilaksanakan namun masih kurang maksimal dalam penyampaian sosialisasi kepada masyarakat sehingga ini menyebabkan masyarakat masih belum memahami Program OSS ini secara mendetail. Meskipun Program OSS ini merupakan Program dari pusat akan lebih baik jika sosialisasi juga dilaksanakan di Purwakarta sendiri untuk memberikan pemahaman yang mendalam lagi kepada masyarakat terkait Program OSS ini, karena meskipun program dari pusat bukan berarti semua masyarakat telah memahami sosialisasi yang diberikan oleh pusat.

3. Dukungan

Dukungan adalah segala sesuatu yang dapat membantu berjalannya program OSS ini, baik berupa dukungan dari instansi terkait, dukungan dari masyarakat maupun sarana dan prasarana yang digunakan dalam Program OSS ini sendiri. Dukungan daerah dalam mendorong percepatan penyelesaian komitmen pelaku usaha. Dukungan daerah tersebut, mencakup tiga hal. Pertama, percepatan pengerjaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh daerah sebagai standar peta digital. Kedua, pemerintah juga mengarahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sebagai hub-OSS di daerah. DPM-PTSP didambakan dapat bertindak aktif memberi notifikasi ke sistem OSS dan berkoordinasi dengan dinas daerah terkait. Ketiga, menuntut agar kepala daerah meningkatkan pengecekan atas kegiatan usaha di daerahnya. Dengan menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) yang selanjutnya berkoordinasi dengan Satgas Nasional dan Satgas kementerian dan lembaga. Jadi dapat disimpulkan bahwa dukungan dari pemerintah terkait program OSS ini sendiri cukup besar, sehingga memberikan peluang untuk program ini agar bisa berkembang lagi kedepannya di dukung oleh komitmen pemerintah sendiri untuk menyukseskan program ini.

4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi dapat diartikan sebagai pembagian tugas, dan pembagian tugas yang adil, dalam artian tugas yang diberikan setiap aktor pelaksanaan program OSS ini dibagikan berdasarkan pada keuletan, kerja keras, keberuntungan, dan bakat dapat menentukan seberapa jauh potensi dapat diaktualisasikan. Di dalam Dinas PTSP pembagian potensi ini diartikan seperti *the right man in the right place* dimana menempatkan orang sesuai keahliannya. Namun dalam praktiknya di dinas PTSP kab Purwakarta masih belum menerapkan prinsip ini Jadi dapat disimpulkan dari indikator terkait implementasi program OSS bahwa implementasi program ini belum terimplementasi dengan baik sebab masih banyak kekurangan terkait kemampuan organisasi dalam melayani masyarakat, informasi yang diberikan kepada masyarakat pun masih jauh dari baik serta pembagian potensi yang kurang tepat.

Berdasarkan Dunn dalam Agustino (2008 :187) evaluasi kebijakan adalah sesuatu yang berhubungan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat akan evaluasi atas pengendalian masalah, lalu reaksi tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi penilaian secara khusus dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan

dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Analisis evaluasi kinerja OSS menurut indikator Willian Dunn :

1. Efektivitas

Efektifitas adalah pencapaian tujuan yang tepat berdasarkan pada visi dan misi yang sebelumnya telah dibuat dalam suatu unit organisasi. Menurut penuturan salah satu aparat yang bekerja sebagai user OSS, selama ini penggunaan website ini lebih memudahkan para pemodal serta masyarakat yang ingin mendapat izin usaha tanpa harus dipersulit dengan birokrasi yang rumit. Selain itu, birokrasi yang berbasis online ini meminimalisir potensi pungli yang sering terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa indikator ini masih belum tercapai karena apa yang seharusnya menjadi tujuan tidak memberikan hasil yang seharusnya sesuai pada tujuan awal.

2. Efisiensi

Efisiensi disini dapat diartikan sebagai penyederhanaan, Dengan adanya digitalisasi program penanaman modal asing dan perizinan usaha ini semakin memudahkan masyarakat serta mengurangi jumlah waktu, usaha dan tenaga yang dibutuhkan oleh mereka. Hanya saja ada kendala dan sering banyak keluhan dirasakan oleh operator di daerah karena minimnya pelatihan penggunaan website ini sehingga kadang mempersulit aparat sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa program ini ada untuk menyederhanakan sistem lama yang lebih berbelit namun dalam praktiknya Dinas DPMPTAS ini sendiri masih kesulitan untuk mengoperasikan sistem baru ini. Sehingga indikator ini dapat dikatakan masih belum tercapai dan dibutuhkan pemberian pelatihan untuk operator sendiri untuk mencapai indikator ini.

3. Ketepatan

Ketepatan dapat dilihat dari tercapainya tujuan, apabila tujuan awal telah tercapai maka program dapat dikatakan berhasil. Seperti yang telah diharapkan oleh pemerintah pusat melalui Kominfo RI bahwa birokrasi perizinan usaha yang berbelit-belit dan lama harus di buat sederhana dan cepat. Maka digitalisasi memang menjadi jawaban yang paling tepat untuk permasalahan perizinan tersebut. Hanya saja kurangnya sosialisasi serta pemahaman masyarakat mengenai teknologi (gaptek) membuat program ini sedikit terkendala. Oleh karena itu perlu adanya pendamping bagi masyarakat yang memang belum paham mengenai alur pendaftaran melalui website OSS ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan Program OSS ini masih belum tercapai, karena yang menjadi tujuan awal yaitu,

menyederhanakan birokrasi masih memiliki kendala terkait operator OSS sendiri dan masyarakat yang masih belum mendapat pemahaman tentang program OSS ini.

5. SIMPULAN

Simpulan

Sesuai dengan teori strategi Warwick memiliki indikator antara lain pemindaian lingkungan, formulasi, implementasi, dan evaluasi, dinas DPMPTSP telah dapat dikatakan memiliki satu pelayanan masyarakat yang prima. Ditinjau dari; Adanya perubahan sistem perizinan usaha dengan sistem online dengan menggunakan web OSS yang mempermudah masyarakat dalam membuat/melakukan perizinan bisa dirumah tidak harus ke dinasnya, hanya dengan persyaratan ktp, npw, email. Sebagai Dinas yang menyelenggarakan pelayanan masyarakat khususnya bidang penanaman modal dan perizinan DPMPTSP mempunyai tujuan membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan. Bagi penanam modal itu sendiri menurut analisis kelompok kami sudah sudah dijalankan dengan baik pada penerapan pada OSS, yang dimana dalam DPMPTSP memiliki tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha yang telah membuat NIB yang dipantau setiap tiga bulan sekali apakah masih terus berjalan atau tidak. Kemampuan organisasi di dalam Dinas PTSP dengan cara membantu masyarakat yang masih kesulitan dalam mengisi data dan menggunakan program OSS ini. sebab masih banyak masyarakat yang gagap teknologi. Padahal Penggunaan website ini dapat memudahkan para pemodal serta masyarakat yang ingin mendapat izin usaha tanpa harus dipersulit dengan birokrasi yang rumit. Selain itu, birokrasi yang berbasis online ini meminimalisir potensi pungli yang sering terjadi. Dapat disimpulkan bahwa tujuan Program OSS ini masih belum tercapai, karena yang menjadi tujuan awal yaitu, menyederhanakan birokrasi masih memiliki kendala terkait operator OSS sendiri dan masyarakat yang masih belum mendapat pemahaman tentang program OSS ini.

Saran

Di era digitalisasi seperti sekarang ini, mindset kita selalu berpandangan bahwa pelayanan digital pasti dapat meningkatkan mutu pelayanan tersebut. Pernyataan tersebut memang sepenuhnya benar akan tetapi penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Pemberian pendidikan teknologi terhadap aparat pelayanan negara harus beriringan dengan kebijakan penerapan OSS.

2. Peningkatan sosialisasi, dan website desain harus mudah di mengerti dan di gunakan sehingga tidak menimbulkan muliti tafsir dana kesalahan penggunaan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dunn, William N. (2003). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama

J. David Hunger & Thomas L. Wheelen (2009). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi Offset

Sugiyono.(2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta,CV.

Taufiqurokhman. (2015). *Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM*.Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr. Moestopo Beragama

Peraturan :

Peraturan Pemerintahan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 26 September 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik. 21 Juni 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215. Jakarta

Website:

Mochammad Januar Rizki (2019). Dinilai Tak Maksimal, aturan OSS perlu dievaluasi. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/ba-ca/lt5d78d3507/dinilai-tak-maksimalaturan-oss-perlu-dievaluasi/>

La Ode Rahmat Putra Rustaman (2017). Strategic Management (Wheelen and Hunger). Retrieved from <https://laoderahmatprustaman.wordpress.com/2017/04/03/60/>